

PENGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

Rosmayani¹, Arham², Fitriyani syukri³, Fatimah⁴, Yadi Arodhiskara⁵

Email: rosmayani454@gmail.com¹, arham83rockt@gmail.com², fitriyanisyukri19@gmail.com³,
fatimahumpar11@gmail.com⁴, yadhi01@gmail.com⁵

^{1,2,4,5}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

³Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan
Kode Pos 91112

Abstrak

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemajuan teknologi digital menawarkan tantangan sekaligus peluang baru dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Kota Parepare. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola Badan Keuangan Daerah, khususnya bidang akuntansi dan pelaporan, serta beberapa staf yang berjumlah empat orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital memudahkan pengelolaan data keuangan, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan ketepatan serta akurasi informasi yang disajikan. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan teknologi digital, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mampu memperlihatkan proses yang lebih terbuka, meminimalisir potensi kesalahan, dan memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap informasi keuangan daerah.

Kata Kunci: Teknologi Digital, Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Informasi Keuangan

Abstract

The digital era has brought significant changes in various aspects of life, including regional financial management. The advancement of digital technology presents both challenges and new opportunities in enhancing accountability and transparency in regional finances. This study aims to identify the impact of digital technology in improving accountability and transparency of regional financial management in Parepare City. The informants in this study consisted of the management of the Regional Financial Management Agency, specifically in the fields of accounting and reporting, as well as several staff members, totaling four people. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis, which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of digital technology at the Regional Financial Management Agency of Parepare City has had a positive impact on the quality of the local government's financial reports. The application of a digital-based financial information system facilitates the management of financial data, accelerates the reporting process, and improves the accuracy and precision of the information presented. This directly contributes to enhancing accountability and transparency in the management of regional finances. By utilizing digital technology, the Regional Financial Management Agency of Parepare City is able to demonstrate a more transparent process, minimize potential errors, and ensure easier access for the public to regional financial information.

Keywords: Digital Technology, Accountability, Transparency, Financial Information System



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mencapai kemajuan yang signifikan dan telah menyentuh berbagai bidang, termasuk sektor keuangan pemerintah. Implementasi sistem informasi keuangan daerah menjadi salah satu upaya yang banyak diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik di berbagai negara. Era digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Kota Parepare sebagai salah satu kota di Indonesia turut merasakan dampak dari perkembangan ini. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, muncul tantangan dan peluang baru dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [1].

Perkembangan teknologi yang pesat juga berdampak pada sektor ekonomi dan bisnis. Persaingan antar pelaku usaha semakin ketat, sehingga diperlukan peningkatan kualitas kerja, mutu pelayanan, serta ketepatan dan keakuratan data. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan sistem informasi yang tidak hanya baik secara teknis, namun juga sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan bisnis dari organisasi atau institusi yang bersangkutan [2]. Sistem informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sangat diperlukan untuk menunjang pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah [3]. Kota Parepare, sebagai salah satu wilayah yang menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangannya, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, efektivitas penerapan teknologi ini masih perlu dikaji lebih lanjut karena pemerintah daerah kerap menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan secara transparan, terutama bila tidak didukung oleh teknologi yang memadai.

Prinsip transparansi menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses informasi mengenai kegiatan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip dasar yang menjamin akses publik terhadap informasi pemerintahan secara terbuka dan bijaksana [4].

Sebagai tambahan, transformasi digital dalam sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika sistem informasi keuangan didesain dengan mempertimbangkan kemudahan akses, keamanan data, serta transparansi, maka publik dapat secara aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran. Dengan begitu, teknologi digital menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, terbuka, dan bertanggung jawab [5].

Melalui latar belakang ini, penelitian akan membahas secara lebih mendalam tentang penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Kota Parepare. Analisis terhadap potensi, tantangan, dan strategi yang diperlukan akan dikaji secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, serta memperluas pemahaman terhadap efektivitas teknologi digital sebagai alat bantu transparansi dan manajemen publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi untuk kepentingan penelitian ini disebut sebagai informan. Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan peran dan relevansinya terhadap fokus penelitian, yakni pengelolaan dan penerapan teknologi digital dalam sistem keuangan daerah. Informan utama dalam penelitian ini berasal dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan. Informan tersebut meliputi:

1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan – sebagai pengambil kebijakan teknis dan pengawas pelaksanaan sistem keuangan berbasis teknologi digital.
2. Staf pelaksana bagian pelaporan keuangan – yang bertugas menginput dan memverifikasi data keuangan dalam sistem.
3. Staf teknis pengelola aplikasi keuangan daerah (seperti SIPD/SIMDA) – yang memahami operasional dan kendala teknis dalam implementasi teknologi digital.
4. Analis kebijakan keuangan daerah – yang memiliki peran dalam menyusun laporan dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data keuangan digital.

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, baik secara strategis maupun teknis. Wawancara dilakukan secara langsung untuk

menggali persepsi mereka mengenai efektivitas, manfaat, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan menggunakan sistem berbasis digital.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengelolaan serta pengaplikasian teknologi digital dalam sistem keuangan daerah. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan empat informan yang terdiri dari pimpinan dan staf Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan. Selain itu, dokumentasi terkait proses dan kebijakan keuangan juga digunakan untuk memperkuat temuan lapangan.

Penggunaan pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih mendalam dalam konteks nyata dan spesifik, yaitu pada lingkungan kerja instansi pemerintah di Kota Parepare. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan informan terkait implementasi teknologi digital, tantangan yang dihadapi, serta manfaat yang dirasakan. Sementara itu, observasi dilakukan untuk melihat langsung aktivitas yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan, sedangkan dokumentasi mendukung validitas data dan memberikan bukti tertulis dari proses keuangan yang terjadi [6].

Agar penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan optimal, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat keras dan lunak yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, sistem keuangan digital akan sulit dioperasikan secara efisien dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan transparansi dan akuntabilitas [7]. Selain itu, pelatihan berkelanjutan dan penguatan kapasitas aparatur juga menjadi faktor penting agar teknologi yang digunakan dapat dimaksimalkan sesuai fungsinya [8].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menemukan data dan informasi tentang penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil wawancara menunjukkan bagaimana Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan teknologi digital dalam operasinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur keuangan setiap daerah di Indonesia, termasuk Kota Parepare. Menurut wawancara, pengelolaan keuangan di setiap daerah, khususnya di Badan Keuangan Daerah, dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 memastikan bahwa seluruh tahapan ini dilakukan dengan baik dan efisien. Dengan bantuan teknologi digital, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih jelas, akuntabel, dan efektif.

Empat informan dalam penelitian ini adalah staf akuntansi dan pelaporan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diwawancarai. Informasi yang diberikan oleh informan tersebut meliputi proses pengelolaan keuangan daerah, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan, dan prosedur pelaksanaan tahapan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan melakukan wawancara ini, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang metode pengelolaan keuangan yang digunakan oleh badan keuangan daerah Kota Parepare dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan dan akuntansi keuangan daerah.

Penerapan teknologi digital di kantor badan keuangan daerah kota parepare menunjukkan sejumlah peningkatan signifikan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu temuan utama adalah kemampuan teknologi digital untuk mengintegrasikan data keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Integrasi data yang baik ini membantu dalam mempercepat proses audit dan memastikan bahwa laporan keuangan tersedia tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah kota parepare meningkatkan transparansi dan membuatnya lebih mudah diakses oleh publik. Teknologi digital memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah diakses, baik oleh pemangku kepentingan internal maupun masyarakat umum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil kinerja dalam mengelola keuangan daerah.

Penelitian mengenai penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan peralihannya ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI). Menunjukkan beberapa kesenjangan yang perlu mendapat perhatian. SIPD awalnya dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di tingkat pemerintah daerah dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Sistem ini membantu dalam perencanaan dan

pengawasan program pembangunan, namun sering terkendala oleh proses manual dan integrasi data yang kurang efisien [14]. Sebaliknya, SIPD-RI dirancang dengan teknologi yang lebih canggih, memungkinkan integrasi data lintas sektor dan wilayah secara real-time. Hal ini memungkinkan data diperbarui dan diakses instan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. SIPD-RI juga menambahkan fitur-fitur baru yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, seperti dashboard analitik komprehensif untuk pemantauan kinerja secara langsung. Namun, dalam implementasinya, peneliti menemukan beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan SIPD dan SIPD-RI. Beberapa di antaranya adalah jaringan server yang tidak mendukung pelayanan, proses penginputan data yang sering mengalami keterlambatan karena kendala jaringan, serta penginputan data yang masih dilakukan secara manual, mengurangi efektivitas dan efisiensi sistem. Masalah ini dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah daerah karena penggunaan sistem yang belum optimal menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. SIPD dan SIPD-RI berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan fitur pemantauan dan pelaporan real-time, analisis kinerja, serta transparansi dan akuntabilitas. SIPD memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan keuangan daerah secara real-time, menyajikan data keuangan yang akurat dan tepat waktu, dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan [15].

Selain itu, SIPD memungkinkan evaluasi anggaran dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. Sistem ini juga membantu menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan transparansi informasi keuangan dengan menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, SIPD membantu dalam perencanaan anggaran dengan menyediakan informasi historis dan tren keuangan yang relevan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan keuangan dan alokasi sumber daya. SIPD juga berperan dalam pengelolaan risiko dengan membantu identifikasi potensi risiko keuangan dan pengembangan strategi pengelolaannya. Meskipun SIPD-RI menawarkan banyak keunggulan, kesenjangan dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi pengguna untuk memastikan sistem ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Untuk mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dan harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, banyaknya sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah membuat sulit bagi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang menggabungkan keuangan antara daerah dan pusat. Dari 524 pemerintah daerah, sebanyak 361, atau 68,89 persen, telah menerapkan sistem informasi keuangan. Namun, 163 dari mereka, atau 31,11 persen, masih tidak jelas atau tidak tahu tentang sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah mereka. Hal ini menciptakan tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, karena kesulitan dalam mengintegrasikan data dan informasi keuangan dari berbagai daerah untuk analisis yang lebih komprehensif. Namun di pemerintah kota parepare itu sendiri sudah menggunakan SIPD RI sebagai alat untuk melaporkan seluruh belanja yang ada di kota parepare di setia SKPD. Data per Oktober 2012 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih jauh dari seragam.

Terdapat perbedaan dalam penggunaan sistem informasi di setiap pemerintah daerah (pemda). Sebanyak 223 pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), 68 menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan 123 menggunakan sistem yang belum terstandarisasi. Terlebih lagi, 110 pemda mengabaikan sistem informasi sama sekali dalam pengelolaan keuangannya namun menurut PERDA-NO.3-THN-2023 menyatakan bahwa jumlah skpd yang ada di kota parepare berjumlah 34 skpd dan semua sudah menggunakan aplikasi SIPD RI.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil diskusi dan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital di Kantor Badan Keuangan Daerah pemerintah Kota Parepare telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi keuangan berbasis digital mampu mempercepat integrasi data keuangan, meningkatkan aksesibilitas laporan, serta memungkinkan pelacakan alur dana secara real-time. Penerapan teknologi digital pada badan keuangan daerah di pemerintah kota parepare sangat berpengaruh besar dalam proses perencanaan hingga pelaporan.

Saran

Berdasarkan temuan dan diskusi penelitian ini, beberapa saran yang dapat dilakukan di masa depan untuk mendukung penggunaan teknologi digital untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Diharap penelitian ini dapat menyoroti pentingnya pelatihan bagi staf di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan teknologi digital. Pemahaman yang memadai tentang sistem dan aplikasi digital akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan melaporkan keuangan daerah dengan cara yang akurat dan transparan.
2. Diharap untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang aplikasi SIPD RI dengan adanya teknologi yang mendukung di era baru yang ada di Kota Parepare, sehingga perencanaan itu bisa terealisasi sampai ke pelaporan supaya Kota Parepare dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Failany, F. & Fahriani. (2024). *Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Pemerintahan Modern.
- [2] Fatimah Rappang. (n.d.). *Peran Sistem Informasi dalam Dunia Usaha*. Makalah tidak diterbitkan.
- [3] Oki, D., Handayani, S., & Ramadhan, T. (2020). "Penerapan Teknologi Informasi dalam Transparansi Keuangan Publik", *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 122-130.
- [4] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [5] Nugroho, R. (2021). *Digitalisasi Pemerintahan: Strategi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [6] Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [7] Setiadi, R. (2021). "Tantangan Infrastruktur dalam Implementasi Teknologi Digital di Pemerintahan Daerah", *Jurnal Teknologi Informasi dan Pemerintahan*, 9(1), 33-42.
- [8] Wahyuni, S. (2020). "Penguatan Kapasitas SDM dalam Transformasi Digital Sektor Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 89–97.
- [9] Alamsyah, A. (2022). *Analisis dan perancangan sistem informasi pelaporan keuangan badan usaha milik desa berbasis desktop*. 1(1), 6–13.
- [10] Andi Kusnadi, Fahmi Oemar, & Bambang Supeno. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>
- [11] Dewi Mantasari, Arfianty, A., & Fatimah, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kec. Suppa Kab. Pinrang. *DECISION: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 106–114. <https://doi.org/10.31850/decision.v4i1.2133>
- [12] Rappang, D. (n.d.). *ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PRODUK Product Accounting Information System Analysisat Pt . Pertani (Persero)*. 1(November 2021), 64–72.
- [13] Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi kebijakan dan tindakan pemerintah , sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik*. 2(4).

- [14] Budiriyanto, E. (2013). Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). *Kementrian Republik Indonesia*. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf
- [15] Failany, M. A., & Fahriani, D. (2024). *Praktek Kerja Lapang Akuntansi Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah*. 1(1), 1–6.